



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ISIS IKHWANSYAH**
2. Jabatan : **DIREKTUR TATA KELOLA, LEGAL DAN KOMUNIKASI**
3. NHK : **762990**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.256.032.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/250 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.562.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/110 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 572.880.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m²/100 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 320.652.000
4. Tanah Seluas 2797 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 932.009.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 324.509.000
2. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS 1.5L PLUS 4X2 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 45.150.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 426.769.713**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.659.960.713
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.659.960.713

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.